



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI IX DPR RI**

- Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : III
Rapat ke : 9 (Sembilan)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Plt Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Kamis, 25 Januari 2018
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Acara : 1. Berdasarkan proyeksi BPS, penduduk Indonesia yang berusia 65 tahun ke atas juga mengalami kenaikan yang signifikan, dari proporsi sebesar 5% pada tahun 2010 diperkirakan naik menjadi 10,5% pada tahun 2035. Mohon penjelasan Plt Kepala BKKBN terkait :
a. Program pemberdayaan Penduduk Lanjut Usia yang diselenggarakan oleh BKKBN;
b. Kerja sama lintas sektor dalam pemberdayaan Penduduk Lanjut Usia;
c. Peran Serta Masyarakat dan Sektor Swasta dalam pemberdayaan Penduduk Lanjut Usia;
2. Penjelasan Plt Kepala BKKBN terkait Pengelolaan dan Pengendalian Sistem Informasi Keluarga yang dilaksanakan oleh BKKBN;
3. Penjelasan Plt Kepala BKKBN terkait Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga) Tahun 2017 seperti KIE Kreatif, Genre dan Kampung KB.
- Ketua Rapat : Dede Yusuf Macan Effendi, S.T.,M..I,Pol/ Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Minarni, SH/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Hadir : A. 16 orang dari 52 orang Anggota Komisi IX DPR RI; 2 orang anggota izin;
B. Plt Kepala BKKBN beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Plt Kepala BKKBN dibuka pukul 10.55 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *tertutup* untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN untuk melakukan kerjasama dalam upaya pengintegrasian program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) termasuk program pemberdayaan lansia dengan Kementerian/Lembaga terkait serta pihak lainnya (antara lain: Swasta, BUMN, Perguruan Tinggi) agar terjadi efisiensi dan efektivitas program yang dijalankan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN untuk bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait, dalam pengelolaan dan pengendalian Sistem Informasi Keluarga sehingga dapat menjadi dasar bagi perencanaan, pengukuran kinerja, dan peta kerja dalam Program KKBPK.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN untuk berinovasi dalam meningkatkan kerjasama lintas sektor dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) sehingga target pencapaian program dapat tercapai.
4. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN untuk meningkatkan efektifitas program KKBPK (yaitu: program Integrasi Kampung KB, Genre Ceria dan KIE Kreatif) sehingga memberikan output yang nyata dan pelaksanaannya dilakukan sejak awal April tahun 2018 dengan mengoptimalkan peran perwakilan BKKBN di daerah sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan optimal dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Rapat diakhiri pukul 14.05 WIB

**Ketua Rapat/
Ketua Komisi IX DPR RI,**


DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol
A-415